

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi menjadi topik yang kompleks untuk dikaji karena dipengaruhi oleh beragam indikator yang saling terkait. Pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan PDB per kapita suatu negara (Tahir *et al.*, 2022), di mana pertumbuhan ekonomi adalah ekspansi aktivitas perekonomian yang menyebabkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi masyarakat mengalami peningkatan. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai isu makroekonomi dalam jangka panjang, masyarakat dapat dikatakan semakin sejahtera apabila terjadi peningkatan output per kapita (Gai *et al.*, 2024). Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dituntut meningkat secara kuantitatif, tetapi juga harus berkualitas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, sekaligus menjadi penggerak bagi penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan.

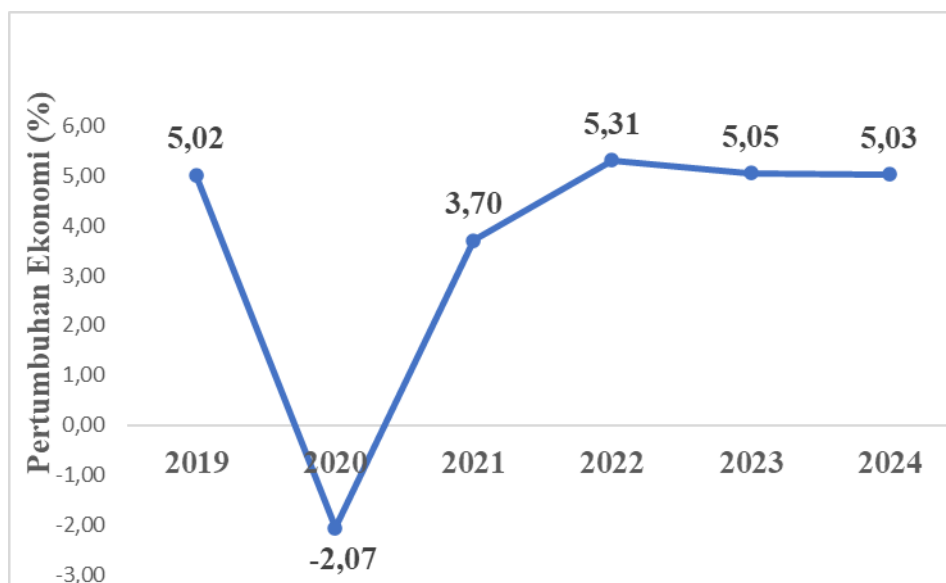
Umumnya, arah pembangunan di negara-negara berkembang lebih banyak difokuskan pada penguatan sektor ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi yang optimal mampu menjadi penggerak kemajuan pada sektor-sektor pembangunan lainnya (Hasibuan *et al.*, 2025). Oleh karena itu, bagi negara berkembang seperti Indonesia, pertumbuhan ekonomi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang lazim diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Peningkatan pendapatan per kapita turut berkontribusi dalam proses ini, karena ketika pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat turut

meningkat sehingga berdampak pada peningkatan konsumsi rumah tangga dan laju pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Argiyanti *et al.*, 2025).

Jika ditelusuri secara historis, karakteristik pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir menunjukkan pola yang cenderung mengalami perlambatan secara struktural. Pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia pernah mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 7% per tahun, menjadikannya salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Namun capaian tersebut terguncang oleh krisis ekonomi 1997–1998 yang menjadi titik balik yang mengubah trajektori pertumbuhan ekonomi Indonesia secara permanen. Setelah melewati masa pemulihan pada era Gus Dur dengan pertumbuhan yang kembali positif mencapai 4,92% pada tahun 2000, pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati meningkat secara bertahap dari 4,5% pada tahun 2002 hingga mencapai 5,03% pada tahun 2004. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pertumbuhan ekonomi relatif stabil pada kisaran 5%–6% selama satu dekade, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2009 akibat tekanan global. Sementara itu, pada masa pemerintahan Joko Widodo hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi cenderung berada pada kisaran 4%-5% dan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan (BPS, 2019). Pola ini mencerminkan tren perlambatan yang nyata, yakni dari rata-rata 7% pada era Orde Baru, melambat ke kisaran 5%–6% pada era SBY, dan kini stagnan di kisaran 5% yang menunjukkan bahwa hal ini bukan sekadar penurunan sementara, tetapi masalah mendasar yang melemahkan pertumbuhan ekonomi.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini stagnan di kisaran 5%, di mana stagnasi tersebut dipengaruhi oleh faktor internal seperti ketersediaan sumber daya alam, tenaga kerja, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah, serta faktor eksternal seperti investasi luar negeri, neraca pembayaran, dan perdagangan internasional (Kurniati *et al.*, 2024). Kondisi ini menjadi dasar pemilihan Indonesia sebagai objek dalam penelitian ini, karena sebagai negara berkembang, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal.

Perkembangan data pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 6 tahun terakhir ditampilkan pada grafik berikut:



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2019-2024 (Persen)

Sumber : World Bank, 2026

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2017-2019 cenderung stagnan pada kisaran 5 persen, hal ini disebabkan oleh kontraksi ekspor serta penurunan kinerja industri

unggulan seperti perdagangan, konstruksi, dan pertanian yang berdampak pada terhambatnya laju pertumbuhan ekonomi nasional (BPS, 2020).

Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi tajam hingga mencapai -2,07 persen akibat pandemi COVID-19 yang menghambat seluruh aktivitas perekonomian, mulai dari penutupan pabrik, terganggunya jalur distribusi, penurunan ekspor, hingga merosotnya investasi asing yang masuk ke Indonesia (BKF Kemenkeu, 2021).

Seiring dengan penerapan kebijakan *new normal* serta meningkatnya cakupan vaksinasi, pemerintah merealisasikan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui peningkatan daya beli masyarakat, pemberian subsidi, dan pemotongan bunga kredit bagi pelaku UMKM sehingga pertumbuhan ekonomi kembali pulih pada tahun 2021 sebesar 3,70 persen (DJKN Kemenkeu, 2023).

Selanjutnya pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,31 persen didukung oleh peningkatan kinerja industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi, serta pengendalian inflasi yang cukup stabil di tengah tekanan perang dagang global dan peningkatan penerimaan pajak (Kemenkeu, 2024).

Pada periode 2023-2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di sekitar 5 persen. mempertegas bahwa perekonomian nasional belum mampu keluar dari jebakan stagnasi pertumbuhan jangka panjang.

Stagnasi pertumbuhan ekonomi menjadi isu yang krusial mengingat pertumbuhan ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai indikator makroekonomi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja,

meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi tingkat kemiskinan. Lebih jauh, stagnasi yang berkepanjangan ini menempatkan Indonesia dalam ancaman serius terhadap *middle-income trap*, yakni kondisi di mana suatu negara terjebak pada level pendapatan menengah dan gagal bertransisi menjadi negara berpendapatan tinggi. Indonesia telah berada pada kategori negara berpendapatan menengah selama beberapa dekade, dan tanpa akselerasi pertumbuhan ekonomi yang signifikan, transisi menuju negara berpendapatan tinggi akan semakin sulit terwujud. Kondisi ini menjadikan penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga mendesak secara kebijakan mengingat Indonesia saat ini berada pada titik kritis dalam upaya keluar dari jebakan pendapatan menengah tersebut.

Oleh karena itu, pemilihan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel utama dalam penelitian ini didasarkan pada perannya yang utama sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, sekaligus karena permasalahan stagnasi yang telah berlangsung selama beberapa dasawarsa dan hingga kini belum terselesaikan. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai upaya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia serta memberikan landasan empiris bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Ada beberapa indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, salah satunya yaitu tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan menjadi salah satu pengaruh yang penting terhadap perekonomian di Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan ketimpangan distribusi

pendapatan (Maskur *et al.*, 2023). Mengacu pada teori lingkaran setan kemiskinan yang dikembangkan oleh Ragnar Nurkse (dalam Hasanah, 2023), tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi melalui rendahnya konsumsi, tabungan, dan investasi dalam perekonomian.

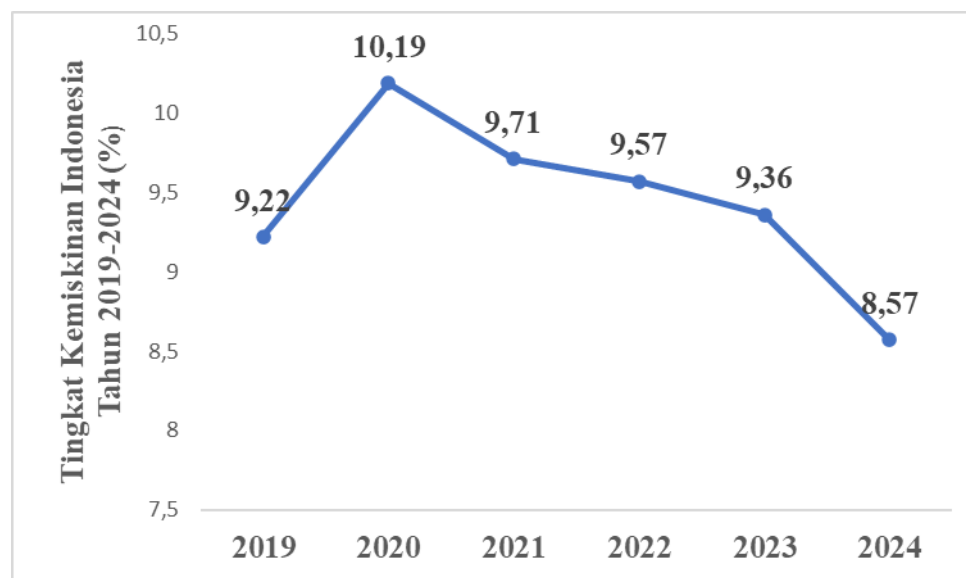
Para ahli berpendapat bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2025). BPS (2024) mendefinisikan tingkat kemiskinan sebagai persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk total suatu daerah, yang menggambarkan kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup layak.

Penurunan tingkat kemiskinan berkontribusi terhadap peningkatan konsumsi masyarakat yang merupakan komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi (Putra, 2021). Menurut Purwanti (2024), kebijakan pengentasan kemiskinan yang efektif merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Penurunan tingkat kemiskinan melalui program pengentasan kemiskinan merupakan faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Rizal & Purnairawan, 2024). Hal ini karena penurunan kemiskinan dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat yang mendorong permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (Agussalim *et al.*, 2024).

Secara umum, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan dari masa ke masa, namun laju penurunannya semakin melambat. Pada era Orde

Baru, kemiskinan berhasil ditekan drastis dari sekitar 60% di awal 1970-an menjadi 11% pada 1996, didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan program pembangunan yang masif. Namun krisis ekonomi 1997–1998 menghancurkan capaian tersebut seketika, dengan angka kemiskinan yang kembali melonjak ke 19,9%. Setelah itu kemiskinan berangsur turun kembali, hingga untuk pertama kalinya menembus angka satu digit pada 2018 sebesar 9,82%, namun sempat kembali naik akibat tekanan pandemi COVID-19 pada 2020–2021 sebelum akhirnya turun ke 8,57% pada September 2024. Pola ini mencerminkan bahwa meskipun angka kemiskinan terus menurun, laju penurunannya semakin lambat dan rentan naik kembali akibat berbagai guncangan ekonomi, sehingga persoalan kemiskinan di Indonesia hingga saat ini belum dapat dientaskan secara optimal (BPS, 2024).

Perkembangan data tingkat kemiskinan Indonesia selama 6 tahun terakhir ditampilkan pada grafik berikut:



Gambar 1.2 Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2019-2024 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan Indonesia selama 6 tahun terakhir mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Pada tahun 2019 tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 9,22 persen, namun meningkat menjadi 10,19 persen pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19 yang menurunkan aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat, mendorong jutaan orang kembali jatuh ke dalam kemiskinan (BPS, 2020). Kondisi ini berlangsung seiring dengan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -2,07 persen pada periode yang sama, yang mengakibatkan berkurangnya lapangan kerja dan melemahnya daya beli masyarakat (BPS, 2020).

Seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi, tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2021 hingga mencapai 8,57 persen pada tahun 2024 (BPS, 2024). Pola tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, di mana ketika pertumbuhan ekonomi melambat atau terkontraksi maka kemiskinan cenderung meningkat, dan sebaliknya ketika ekonomi pulih kemiskinan kembali menurun. Hal ini sejalan dengan teori lingkaran setan kemiskinan Ragnar Nurkse yang menjelaskan bahwa kemiskinan dan rendahnya pertumbuhan ekonomi saling memperlemah satu sama lain dalam sebuah siklus yang sulit diputus tanpa intervensi kebijakan yang tepat (Nurkse, 1953)

Terdapat beberapa penelitian yang meneliti tentang pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan hasil yang beragam. Putri *et al.* (2022) menemukan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Nairizi (2023) juga menunjukkan hasil yang

sama di Indonesia, serta Yuanda dan Haryatiningsih (2022) yang menemukan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Balasubramanian *et al.* (2023) juga menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan pada tingkat global. Di sisi lain, Jonaidi (2012) menemukan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun Eviara *et al.* (2025) menemukan bahwa kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

Selain tingkat kemiskinan faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu Indeks Pembangunan Manusia. IPM merupakan indikator komposit yang dibentuk dari gabungan beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (UNDP, 2022). Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dalam membentuk kualitas hidup manusia secara menyeluruh (Tambunan *et al.*, 2022). Aspek kesehatan diukur dengan angka harapan hidup, aspek pendidikan diukur dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta standar hidup layak diukur dari pengeluaran *per kapita* yang disesuaikan (Hamdani & Asnawi, 2023).

IPM memiliki peran yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara (Nguyen, 2022). Negara yang berhasil meningkatkan IPM cenderung memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan produktivitas yang tinggi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik (Litriani, 2021). Hal ini sejalan dengan kondisi di berbagai negara maju yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM melalui investasi di bidang pendidikan dan

kesehatan telah berkontribusi signifikan terhadap kemajuan ekonomi mereka (Ulyati *et al.*, 2024).

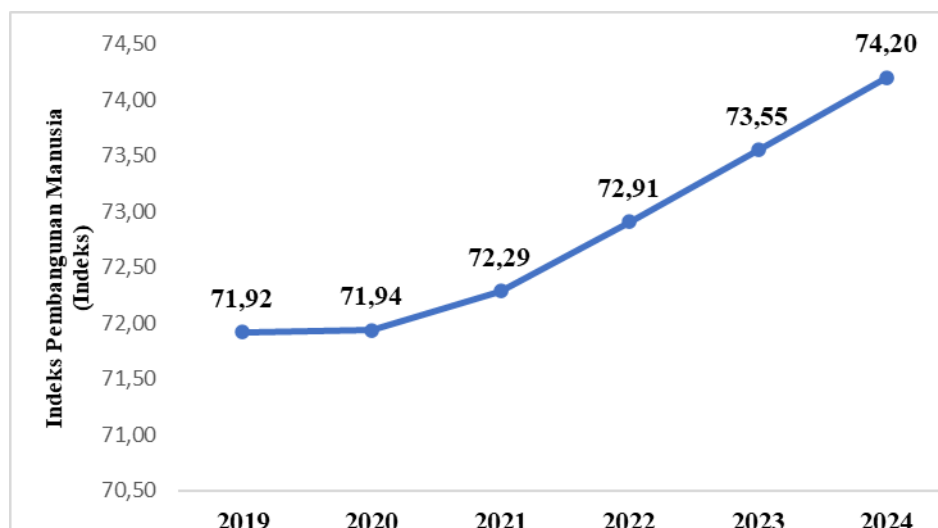
Perbedaan tingkat IPM antarwilayah menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia masih belum merata, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Kondisi tersebut berdampak pada kemampuan setiap daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang juga menjadi tidak seragam. Selain itu, masih terdapat wilayah dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang relatif rendah sehingga berpotensi menghambat peningkatan produktivitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kajian mengenai IPM dan pertumbuhan ekonomi menjadi penting untuk melihat sejauh mana peran kualitas sumber daya manusia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

Pengaruh IPM terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui teori *human capital* yang dikembangkan oleh Gary Becker (1964), yang menyatakan bahwa tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber pertumbuhan ekonomi (Sairmaly, 2023). Masyarakat dengan IPM yang tinggi mampu mengadopsi teknologi baru, meningkatkan efisiensi produksi, dan berinovasi dalam kegiatan ekonomi (Saputra *et al.*, 2021). Hal ini akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Astutik & Aisyah, 2023).

Secara umum, IPM Indonesia sejak tahun 1990-an menunjukkan tren meningkat meskipun sempat mengalami fluktuasi. Sebelum krisis ekonomi 1997–1998, IPM meningkat seiring kondisi ekonomi yang stabil. Namun saat krisis, peningkatan IPM melambat karena turunnya pendapatan, kesehatan, dan

pendidikan masyarakat. Setelah krisis, IPM kembali meningkat seiring pemulihan ekonomi dan perbaikan kebijakan pembangunan manusia. Pada periode 2000-an hingga sekarang, IPM terus naik karena semakin baiknya akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sempat melambat saat pandemi COVID-19, secara umum IPM Indonesia tetap menunjukkan tren meningkat secara bertahap.

Perkembangan data Indeks Pembangunan Manusia Indonesia selama 6 tahun terakhir ditampilkan pada grafik berikut:



Gambar 1. 3 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2019-2024 (Indeks)

Sumber: *Badan Pusat Statistik*, 2026

Berdasarkan Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia selama enam tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang relatif konsisten. Pada tahun 2019, IPM tercatat sebesar 71,92 poin dan meningkat tipis menjadi 71,94 poin pada tahun 2020, meskipun pada periode tersebut perekonomian nasional terdampak pandemi COVID-19. Peningkatan IPM yang tetap terjadi pada masa pandemi menunjukkan bahwa perbaikan akses pendidikan, layanan

kesehatan, dan perlindungan sosial masih mampu menjaga kualitas hidup masyarakat (BPS, 2024).

Selanjutnya, IPM terus meningkat menjadi 72,29 poin pada tahun 2021 hingga mencapai 74,20 poin pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Secara teoritis, peningkatan IPM dipengaruhi oleh membaiknya indikator pendidikan, meningkatnya harapan hidup, serta kenaikan pendapatan per kapita yang mendorong kualitas hidup masyarakat (UNDP, 2022). Namun, secara umum IPM juga dapat mengalami perlambatan atau penurunan apabila terjadi gangguan ekonomi seperti krisis, inflasi tinggi, atau penurunan pendapatan masyarakat yang berdampak pada keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, fluktuasi IPM sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial dan ekonomi suatu negara.

Pola yang unik ditunjukkan oleh hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 2020, ketika pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19, IPM justru tetap menunjukkan peningkatan meskipun relatif terbatas, yaitu sebesar 0,02 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara IPM dan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya sejalan dengan teori *human capital* sebagaimana dijelaskan dalam penelitian (Sairmaly, 2023), sehingga menimbulkan pertanyaan apakah peningkatan IPM benar-benar berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Terdapat beberapa penelitian yang meneliti tentang pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi dengan hasil yang beragam. Jannah *et al.* (2025) menemukan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ulumi *et al.* (2023) juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, serta Masdi *et al.* (2023) yang menemukan hasil serupa di Provinsi Aceh. Sementara itu, Ulyati *et al.* (2024) menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Roidha (2024) menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Adapun Argarani dan Fitriani (2025) juga menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Inflasi menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, selain tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia. Inflasi menjadi acuan utama dalam ilmu ekonomi makro yang digunakan untuk melihat dan mengukur stabilitas perekonomian suatu negara (Simanungkalit, 2020). Pedoman utama kebijakan ekonomi makro di sebagian besar negara di dunia saat ini adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan kesetimbangan harga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kartika & Pasaribu, 2023).

Inflasi merupakan suatu kondisi dimana terjadi kenaikan secara terus-menerus dalam tingkat harga barang dan jasa secara umum (Nuriyah *et al.*, 2024). Inflasi diukur sebagai persentase perubahan indeks harga, dimana indikator yang sering digunakan untuk mengukur inflasi adalah indeks harga konsumen (IHK)

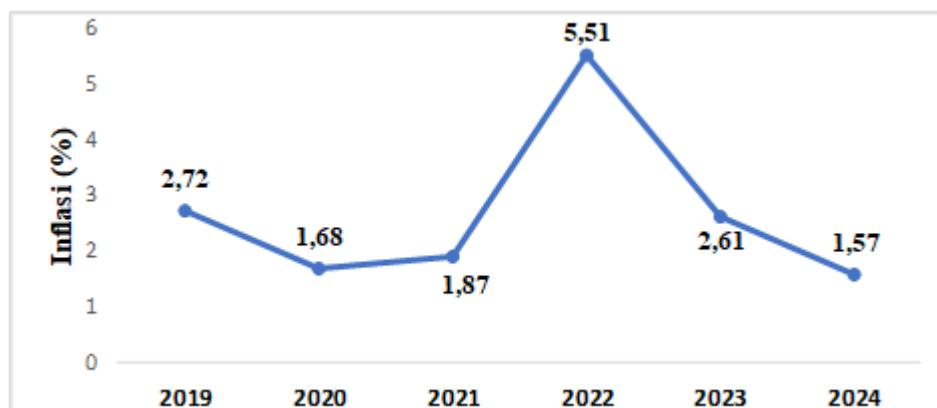
yang lebih dikenal dengan istilah *Consumer Price Index* (CPI) merupakan indeks yang mengukur harga dari berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau konsumen rata-rata, yang biasanya digunakan untuk mengukur tingkat inflasi (Hastin, 2022).

Inflasi memiliki dampak ganda terhadap perekonomian, ibarat dua sisi mata uang yang dapat berdampak positif maupun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Mayasari & Mahinshapuri, 2022). Sisi positif dari inflasi adalah dapat menjadi stimulator pertumbuhan ekonomi, inflasi yang terkendali dapat mendorong aktivitas produksi domestik serta mempercepat perputaran barang di pasar, sehingga meningkatkan keuntungan dan memacu pertumbuhan produksi, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia (Sinurat *et al.*, 2025). Sisi negatif inflasi adalah cenderung akan meningkatkan harga barang secara umum, dan apabila kenaikan terjadi secara berlebihan akan menurunkan gairah produksi dan konsumsi serta beresiko memicu terjadinya hiperinflasi dan menurunkan daya beli masyarakat yang berdampak pada penurunan kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia (Mailadani *et al.*, 2024).

Secara umum, inflasi di Indonesia dalam jangka panjang menunjukkan pola yang berfluktuasi namun cenderung semakin stabil. Pada periode krisis ekonomi 1997–1998, inflasi mengalami lonjakan yang cukup tinggi akibat ketidakstabilan ekonomi nasional dan melemahnya nilai tukar. Memasuki awal tahun 2000-an, inflasi mulai menurun seiring pemulihan ekonomi, penguatan kebijakan moneter, serta peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga. Pada periode 2010-an

hingga saat ini, inflasi relatif lebih terkendali meskipun masih mengalami kenaikan pada kondisi tertentu, seperti pada tahun 2013-2014 akibat penyesuaian harga energi, serta tahun 2022 akibat kenaikan harga komoditas global dan gangguan pasokan pasca pandemi COVID-19. Secara umum, inflasi di Indonesia menunjukkan karakteristik yang semakin stabil dalam jangka panjang, tetapi tetap sensitif terhadap guncangan ekonomi baik dari faktor domestik maupun global (BPS, 2024).

Perkembangan data inflasi Indonesia selama 6 tahun terakhir ditampilkan pada grafik berikut:



Gambar 1.4 Inflasi Indonesia Tahun 2019-2024 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Berdasarkan Gambar 1.4 inflasi Indonesia selama enam tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup jelas. Pada tahun 2019, inflasi tercatat sebesar 2,72 persen dan masih berada pada kondisi stabil. Namun, pada tahun 2020 inflasi menurun menjadi 1,68 persen akibat melemahnya permintaan masyarakat selama pandemi COVID-19 yang menekan konsumsi (BI, 2021).

Memasuki tahun 2021, inflasi mulai meningkat menjadi 1,87 persen seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada

tahun 2022, di mana inflasi melonjak menjadi 5,51 persen yang dipengaruhi oleh kenaikan harga energi dan penyesuaian harga BBM (BI, 2023).

Selanjutnya, pada tahun 2023 inflasi kembali menurun menjadi 2,61 persen dan terus turun menjadi 1,57 persen pada tahun 2024, seiring dengan kebijakan stabilisasi harga dan pengendalian inflasi oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI, 2024).

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, penurunan inflasi pada tahun 2020 terjadi bersamaan dengan kontraksi ekonomi, yang menunjukkan adanya keterkaitan antara keduanya. Menurut teori Keynes, inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan melemahkan konsumsi sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan inflasi yang rendah dan stabil cenderung mendukung kestabilan ekonomi (Mankiw, 2019).

Terdapat beberapa penelitian yang meneliti tentang pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan hasil yang beragam. Safira *et al.* (2025) menemukan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pratama dan Widyastuti (2022) juga menunjukkan hasil yang serupa di Indonesia. Sementara itu, Kartika dan Pasaribu (2023) menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta Fatoni dan Prasetyanto (2022) juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan di Sumatera Utara (jangka pendek). Adapun Fatoni dan Prasetyanto (2022) (jangka panjang) serta Simanungkalit (2020) menemukan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara dan Indonesia.

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selanjutnya yaitu investasi asing langsung. Investasi asing langsung memiliki peranan penting dalam mendorong perekonomian Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia terus berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang memerlukan dukungan investasi sebagai sumber pembiayaannya (Putra, 2021). Investasi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu pemerintah perlu menciptakan kondisi yang menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia (Ganar *et al.*, 2021).

Investasi asing langsung adalah bentuk penanaman modal dari investor luar negeri yang tidak hanya mentransfer dana, tetapi juga terlibat secara langsung dalam mengelola dan mengambil keputusan operasional perusahaan di negara tujuan (Mahadiansar *et al.*, 2021). Investor asing memiliki kontrol penuh atau sebagian terhadap jalannya bisnis yang membedakannya dengan investasi portofolio hanya berupa penanaman modal tanpa keterlibatan dalam manajemen, sehingga akumulasi modal yang mencakup berbagai bentuk investasi seperti tanah, peralatan produksi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Triarsa & Purbadharmaja, 2021).

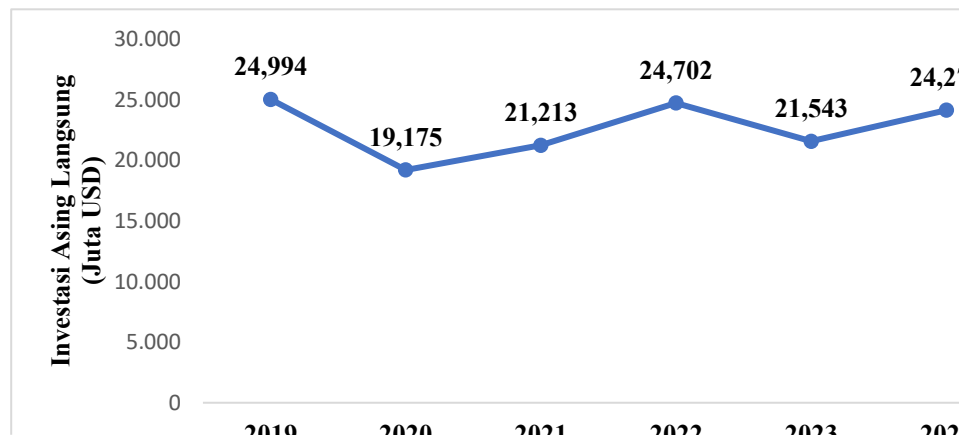
Akumulasi modal ini dapat bersumber dari Investasi asing langsung maupun investasi dalam negeri yang keduanya memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ekonomi Indonesia (Aji *et al.*, 2023).

Pembentukan modal dan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara (Nurlaili & Sugiharti, 2023).

Salah satu upaya untuk meningkatkan kedua faktor tersebut adalah kebijakan mengundang masuknya investasi asing, yang tidak hanya membawa modal finansial tetapi juga transfer teknologi dan pengetahuan (Ratna & Hutabarata, 2020). Ketika investor asing menanamkan modalnya di Indonesia akan memicu pertumbuhan sektor-sektor produktif yang menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Mirah *et al.*, 2021).

Secara umum, nilai FDI di Indonesia pada periode 2010-2019 mengalami kecenderungan meningkat setiap tahunnya, kecuali 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 43,9 triliun atau sebesar 10 persen dari tahun sebelumnya. Pada 2019 kembali mengalami peningkatan sebesar 7,74 persen. Penurunan yang cukup drastis pada 2018 disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah sentimen perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok, pengetatan kebijakan moneter di Amerika Serikat yang berefek pada arus keluar dari negara-negara emerging market. Berdasarkan sektor, sektor manufaktur atau industri pengolahan merupakan sektor terbesar penempatan FDI dalam satu dekade terakhir. Nilai kumulatifnya mencapai US\$112,2 miliar. Artinya, sektor manufaktur merupakan sektor primadona bagi investor asing. Sedangkan primadona berikutnya adalah sektor jasa (US\$100,9 miliar) dan sektor pertambangan (US\$36 miliar) (DPR RI, 2020)

Perkembangan data investasi asing langsung Indonesia selama 6 tahun terakhir ditampilkan pada grafik berikut:



Gambar 1.5 Investasi Asing Langsung Indonesia tahun 2019-2024 (Miliar USD)

Sumber : *World Bank*, 2026

Berdasarkan Gambar 1.5 FDI Indonesia selama periode 2019-2024 menunjukkan pola fluktuasi yang tidak terlepas dari dinamika global maupun domestik. Pada tahun 2019, FDI tercatat sebesar 24,994 miliar USD, namun turun tajam menjadi 19,175 miliar USD pada 2020 akibat pandemi COVID-19 yang melumpuhkan aktivitas ekonomi global dan mendorong investor asing menahan keputusan investasi mereka di tengah ketidakpastian yang tinggi (BPS, 2021). Penurunan ini sejalan dengan kerangka Harrod-Domar yang menegaskan bahwa investasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang searah terbukti ketika FDI turun pada 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia pun ikut berkontraksi hingga -2,07 persen (Manaf, 2025).

Memasuki 2021 dan 2022, FDI kembali meningkat seiring pemulihan ekonomi nasional yang ditopang oleh keberhasilan program vaksinasi, pelonggaran mobilitas masyarakat, serta bangkitnya permintaan domestik dan ekspor komoditas (Kemenkeu, 2022).

Namun pada 2023, FDI kembali menurun sejalan dengan tren global, di mana kenaikan suku bunga agresif The Fed hingga 5,25–5,5 persen mendorong arus modal kembali ke Amerika Serikat dan mengurangi minat investor terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia (UNCTAD, 2023). Pada 2024, FDI kembali menguat ke 24,107 miliar USD, menunjukkan pulihnya kepercayaan investor seiring meredanya tekanan suku bunga global.

Terdapat beberapa penelitian yang meneliti tentang pengaruh investasi asing (FDI) terhadap pertumbuhan ekonomi dengan hasil yang beragam. Rauf (2024) menemukan bahwa FDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Rizky (2020) juga menemukan hasil yang sama di Indonesia, serta Wang (2002) yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan di 12 negara Asia. Sementara itu, Purno *et al.* (2025) menemukan bahwa FDI berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang. Jufrida *et al.* (2016) juga menemukan bahwa FDI berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Adapun Sulistiawati (2023) menemukan bahwa FDI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan uraian-uraian di atas serta penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan pada lokasi, periode waktu, sumber data dan metode penelitian yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian dan ketidakkonsistenan hubungan antar variabel. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Inflasi dan Investasi Asing Langsung

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dengan menggunakan *Error Correction Model* (ECM) yang dapat membedakan respon jangka panjang dan jangka pendek variabel bebas terhadap variabel terikat.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
4. Bagaimana pengaruh investasi asing langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
2. Mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?

3. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
4. Mengetahui pengaruh investasi asing langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk memberikan kontribusi dan memperkaya ilmu pengetahuan terkait dengan permasalahan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, inflasi, dan investasi asing langsung di Indonesia.
2. Sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang ekonomi, khususnya ekonomi pembangunan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya yang terkait dengan kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, inflasi, dan investasi asing langsung.
2. Sebagai tambahan sumber informasi dan bahan masukan bagi dunia usaha dan masyarakat terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.